

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**

PERNANDO SEMBIRING

**Program Studi Hukum
Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality**

Abstract

Tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negara. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, namun terorisme tetap menjadi ancaman yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga melintasi batas-batas negara, mengingat karakteristiknya yang terorganisir dan lintas negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pemberantasan terorisme menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode library research yang menggunakan literatur sebagai sumber data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti mendeskripsikan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan hukum dan memerangi tindak pidana terorisme. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan dan sumber daya manusia, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, pencegahan radikalisme, program deradikalisasi, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta pengawasan perbatasan. Implementasi upaya tersebut melibatkan langkah-langkah konkret seperti pelatihan, kerja sama internasional, program pencegahan radikalisme, pendidikan masyarakat, dan pengawasan perbatasan.

JUDICIAL REVIEW OF THE GOVERNMENT'S ROLE IN EFFORTS TO ERADICATE TERRORISM IN INDONESIA

PERNANDO SEMBIRING

**Law Study Program
Faculty of Social and Law, Quality University**

Abstract

Terrorism in Indonesia poses a serious threat to the security and stability of the nation. Despite efforts to combat it, terrorism remains a threat that has not been fully eradicated. This threat is not only national but also crosses international borders, given its organized and transnational characteristics. Therefore, the role of the government in counterterrorism efforts is crucial to safeguard the security and well-being of Indonesian society. This study is a normative legal research using the library research method, utilizing literature as the data source. It is descriptive analysis, wherein the researcher describes, examines, explains, and analyzes relevant laws and regulations pertaining to the research issue. The research findings indicate that the legal framework for combating terrorism in Indonesia has been established by Law Number 15 of 2003, providing a strong foundation for law enforcement and combating terrorist acts. The government has undertaken various efforts, including enhancing law enforcement capacity through training and human resources, international cooperation in information exchange, prevention of radicalization, deradicalization programs, public education and awareness, and border control. The implementation of these efforts involves concrete measures such as training, international cooperation, prevention of radicalization programs, public education, and border surveillance.